

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PEKERJA STATUS PESERTA MAGANG**

TESIS

Oleh :

IDUL FITRI KUENGI SIRAIT

2002190094



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA STATUS
PESERTA MAGANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

IDUL FITRI KUENGI SIRAIT

2002190094



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idul Fitri Kuengsi Sirait

NIM : 2202190094

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Status Peserta Magang”** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjan di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 02 Desember 2024



(Idul Fitri Kuengsi Sirait)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Status Peserta Magang”

Oleh :

Nama : Idul Fitri Kuengsi Sirait
NIM : 2202190094
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum, pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 02 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn, M.Sc.

NIDN : 0305046406

Pembimbing II,

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

NIDN : 0330106505

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Paltuada Saragi, S.H., M.H.
NIDN : 0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIDN : 0320116402



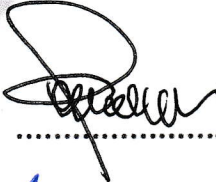


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari ini Senin, tanggal 02 Desember 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana strata Dua pada Program Studi Hukum Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Idul Fitri Kuengsi Sirait
NIM : 2202190094
Program Studi : Magister Hukum
Kosentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA STATUS PESERTA MAGANG”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn, M.Sc.	Ketua	
2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idul Fitri Kuengsi Sirait
NIM : 2202190094
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Status Peserta Magang

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di
Jakarta, 02 Desember 2024



Idul Fitri Kuengsi Sirait
2202190094

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia. Adapun judul tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Status Peserta Magang”. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dosen pembimbing Ibu Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. dan Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenalkanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia.
2. Direktur Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Bernadetha, M.Pd., PA. Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., sebagai Ketua Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan menjadi mahasiswa Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum., selaku Penguji III.

5. Kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
6. Kepada seluruh staff dan karyawan Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia yang banyak membantu dalam proses belajar dikampus tercinta.
7. Orang Tua tercinta, yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
8. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dorongan semangat yang tidak kenal lelah kepada penulis.
9. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sabri selaku Bapak Antonno Tjahjono dan Bapak Sabri selaku Direktur di PT. Sarana Unggul Pratama, yang juga banyak memberikan support dan batuan materil dan moril selama ini.
10. Kepada Yessi Panjaitan dan rekan-rekan kerja PT. Sarana Unggul Pratama yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, yang ikut memberikan dorongan dan kerjasamanya serta semangat persahabatan dalam almamater.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 02 Desember 2024

Penulis,

IDUL FITRI KUENGI SIRAIT

NIM : 2202190094

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Metode Penelitian	14
G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	21
1. Kerangka Teori	21
a. Teori Perlindungan Hukum	21
b. Teori Keadilan Hukum	22
2. Kerangka Konsep	25
H. Sistematika Penelitian	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Landasan Teori	31
1. Perlindungan Hukum	31
2. Teori Keadilan Hukum	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum	41
C. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Ketenagakerjaan	43

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	43
2. Norma, Prinsip dan Tujuan	44
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pemagangan.....	52
1. Pengertian Perjanjian Peserta Magang	52
2. Syarat-Syarat dan Esensi Program Pemagangan	54

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA MAGANG

DALAM MENDAPATKAN HAKNYA	55
A. Ketentuan Mengenai Hak Peserta Magang.....	55
B. Status Peserta Magang	61
C. Bentuk-Bentuk Pemagangan di Dalam Negeri	63
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Magang Dalam Mendapatkan Haknya.....	66
E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	80

BAB IV : BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SEBAGAI PENYALUR PESERTA MAGANG DAN PERUSAHAAN PENERIMA PESERTA MAGANG YANG MEMPERSAMAKAN PEKERJAAN DENGAN KARYAWAN PADA UMUMNYA

A. Klasifikasi Pekerjaan Pada Karyawan Tetap, PKWT, <i>Outsourcing</i> Dan Peserta Magang	93
B. Pertanggung Jawaban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerjanya....	96
C. Pertanggung Jawaban Hukum Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahaan	100
D. Konsekuensi atau Sanksi Hukum Bagi Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Yang Mempersamakan Pekerjaan Status Peserta Magang Dengan Karyawan Pada Umumnya	107

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
Daftar Pustaka	115
Lampiran	119



ABSTRAK

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Status Peserta Magang.

Program pemagangan dalam negeri merupakan program yang dipersiapkan pemerintah yang di desain untuk mempersiapkan atau meningkatkan *skill* atau keahlian bagi calon tenaga kerja berbasis pelatihan kerja, yang dalam hal ini memiliki hak-hak yang harus dilindungi bagi perusahaan yang menggunakan tenaga pemagangan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya Peserta Magang mempunyai hak mulai dari mendapatkan bimbingan instruktur, memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh uang saku, mendapatkan program jaminan sosial serta mendapatkan sertifikat. Fenomena penggunaan tenaga kerja dengan status magang terjadi di perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi, pemagangan menjadi alternatif untuk mendapatkan *cost* upah yang rendah (upah murah), menghindari perselisihan hubungan industrial serta adanya kemudahan untuk menghentikan peserta magang jika tidak dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa memberikan kompensasi apapun. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur norma-norma hukum yang harus ditaati perusahaan dalam menggunakan pemagangan, namun tampaknya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi ini masih memiliki banyak kelemahan sehingga perusahaan maupun lembaga pelatihan kerja masih melakukan pelanggaran terhadap hak-hak peserta magang.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan regulasi mengenai pemagangan harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta magang yang tidak membuat kebingungan atau ada dualisme peraturan, serta membuat regulasi terhadap pengawasan Peserta Magang dan memberikan wadah pelaporan yang penegakannya tidak terlalu panjang. Pengusaha harus bertanggung jawab memberikan rasa keadilan kepada peserta magang tidak boleh memperlakukan sama jenis pekerjaan peserta magang dengan karyawan pada umumnya namun lebih banyak memberikan pelatihan berbasis kerja, maka harus ada regulasi yang memberikan sanksi kepada pengusaha berupa pengangkatan karyawan tetap kepada peserta magang yang dipersamakan pekerjaannya dengan pekerja pada umumnya serta pembekuan sementara tidak bisa menerima Peserta Magang bagi perusahaan yang melanggar, sehingga ini dapat memberikan efek jera kepada perusahaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak Peserta Magang, Program Pemagangan.

ABSTRACT

Title : *Legal Protection of the Rights of Apprentice Position Workers.*

The domestic apprenticeship program is a program prepared by the government which is designed to prepare or improve skills or expertise for prospective workers based on job training, which in this case has rights that must be protected for companies that use apprentices regulated in Article 13 of the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, which basically Apprentices have rights ranging from getting instructor guidance, obtaining occupational safety and health facilities, getting pocket money, getting social security programs and getting certificates. The phenomenon of using apprentices occurs in companies in Bekasi Regency, apprenticeship is an alternative to getting low wage costs (low wages), avoiding industrial relations disputes and the ease of stopping apprentices if they are not needed at any time without providing any compensation. Bekasi District Regional Regulation (Perda) No. 4 of 2016 concerning Manpower has regulated the legal norms that companies must comply with in using apprenticeships. However, it seems that this Bekasi District Regional Regulation still has many weaknesses so that companies and vocational training institutions still violate the rights of apprentices.

*The type of research used in the preparation of this thesis is *yuridis normatif* research (normative legal research method). This research examines and analyzes library materials in the form of legislation and literature related to the issues to be discussed.*

The results of the research conclude that regulations regarding apprenticeship must provide legal protection for the rights of apprentices that do not create confusion or dualism of regulations, as well as make regulations for the supervision of apprentices and provide a reporting platform whose enforcement is not too long. Employers must be responsible for providing a sense of justice to apprentices who should not treat the same type of work as apprentices with employees in general but provide more work-based training, then there must be regulations that impose sanctions on employers in the form of appointing permanent employees to apprentices who are equated with workers in general and temporary freezing cannot accept apprentices for companies that violate, so that this can have a deterrent effect on companies.

Keywords: *Legal Protection, Apprentices' Rights, Apprenticeship Programme.*